

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung;
- Abdurrahman. 2004. *Kedudukan Hukum ADAT Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Akademik Presindo : Jakarta;
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Prenadamedia Group : Jakarta;
- Adrian Sutedi. 2014. *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Cet.III. Sinar Grafika: Jakarta
- Bachtiar Effendie. 1993. *Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni : Bandung;
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*. Djambatan : Jakarta;
- Dadang Juliantara. 1995. *Sengketa Tanah. Modal dan Transformasi*. Forum LSM LPSM : Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Segketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. PT Gramedia : Jakarta;
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung;
- H. Sadjijono, 2008, *Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang PRESSindo,Yokyakarta
- H.AH Achmad Chomzah,2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Arkola Offset : Surabaya;
- I Ketut Partha Cahyadi, 2015, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap*

Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten  
Gianyar, FH Unud

Irwansyah, 2020, *Penlitian Hukum: Piihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta

Indoharto. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti : Bandung;

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan Ketiga*. Konstitusi Press : Jakarta;

K. Wantijk Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia : Jakarta;

Maria S.W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas : Jakarta;

Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Penerbit Republika : Jakarta;

Mustofa dan Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah (Untuk Industri)*. Sinar Grafika : Jakarta Timur;

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta;

Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta;

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2009. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press, Cetakan Keempat: Yogyakarta

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet. 2*. Kencana : Jakarta;

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media: Jakarta

R. Soehadi. 1995. *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria*. Karya Anda : Surabaya;

- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung;
- Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada : Jakarta;
- R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta;
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah Cet. 1*. Liberty : Yogyakarta;
- Suardi. 2005. *Hukum Agraria*. Badan Penerbit IBLAM : Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Hukum Acara Perdata, Edisi Keenam*. Liberty : Yogyakarta;
- Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. PUKAP: Makassar.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soebekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Zairin Harahap, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Get IV, PT Rajawali Grafindo, Jakarta

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

## JURNAL

- Arung Labi, Joshua Melvin, Sri Susyanti Nur, dan Kahar Lahae. 2021. *"Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan"*. Mulawarman Law Review 6 (1).
- U. Indrayanto. 2006. *Perubahan Pokok dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Tahun Ke-36 No.3 Juli-September.
- Farida Patittingi., et al. (2021). *Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone*. Panrita Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Hasanuddin, 5(1).
- Hamidi dan M.A. Latif, 2021 *"Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional" Yudisia : Jurnal Pemikiran Umum dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 1.
- Muhammad Ilham Arisaputras, dkk., 2017, *Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat*, Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 2.
- M. Ridjal Adelansyah Syam, Farida Pattitingi, Sri Susyanti Nur, 2022. *The Legal Subject Non-Residential Condominium Management Activities: Unjung Pandang Central Market*. Vol. 4.
- Sulastriyono. 1997. *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*. Tesis, Jakarta: Program Padsa sarjana UI.
- Nur, S. S. 2015. *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah*. Hasanuddin Law Review, Vol. 1 Nomor 1.

## INTERNET

Catat, Ada 2.546 Sengketa Tanah Sepanjang 2018.

<https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah-sepanjang-2018>.

Ada 8.959 Sengketa Lahan, Terbanyak Konflik Antar Masyarakat.

<https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959-sengketa-lahan-terbanyak-konflik-antar-masyarakat>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pertanahan\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional).

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/23/rechtsverwerking-dan-acquisitive-verjaring-ditinjau-dari-aspek-hukum-tanah-nasional/#:~:text=Acquisitive%20verjaring%20merupakan%20prinsip%20yang,dari%20hukum%20adat%20di%20Indonesia>.